



## DETERMINAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Aris Eddy Sarwono

Program Studi Akuntansi Universitas Slamet Riyadi Surakarta  
aris\_sarnur@yahoo.co.id

### Info Artikel :

Diterima : 22 Desember 2021

Disetujui : 26 Desember 2021

Dipublikasikan : 29 Desember 2021

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
PAD,  
Retribusi  
Daerah, Pajak  
Reklame,  
Pajak Parkir,  
Pajak  
Restoran, Bea  
Perolehan  
Hak atas  
Tanah dan  
Bangunan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Faktor tersebut diantaranya adalah retribusi daerah, pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Penelitian ini menggunakan data sekunder. Jumlah Observed pada penelitian ini sebanyak 76 yang bersumber dari 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Periode penelitian ini adalah periode tahun 2015-2018. Metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan E-views. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan BPHTB berpengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap PAD. Variabel pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel kontrol jumlah penduduk dan luas wilayah. Hasil pengujian menunjukkan variabel kontrol jumlah penduduk dapat mengontrol variabel dependen (PAD). Jumlah penduduk yang banyak akan semakin menambah banyaknya PAD yang diperoleh suatu daerah, sedangkan variabel kontrol luas wilayah tidak dapat mengontrol variabel PAD. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat membahas faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap PAD.

### ABSTRACT

**Keywords:**  
PAD, Regional  
Retribution,  
Advertising  
Tax, Parking  
Tax,  
Restaurant  
Tax, Customs  
for Acquisition  
of Land and  
Building  
Rights

*This study aims to determine the factors that affect the Regional Original Income (PAD) in the district/city government in Central Java Province. These factors include regional levies, advertisement taxes, parking taxes, restaurant taxes and land and building rights acquisition fees (BPHTB). This study uses secondary data. The number of Observed in this study was 76 originating from 19 Regencies/Cities in Central Java Province. The research period of this research is the period 2015-2018. The research method used in this research is panel data regression analysis with E-views. The results showed that regional levies had a negative and significant effect on PAD, while BPHTB had a significant positive and significant effect on PAD. The advertisement tax, parking tax, and restaurant tax variables have no significant effect on PAD. In addition, this study uses the control variables of population and area. The test results show that the population control variable can control the dependent variable (PAD). A large number of residents will increase the amount of PAD obtained by an area, while the control variable for area area cannot control the PAD variable. Suggestions for further researchers can discuss other factors that affect PAD.*

## PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut. PAD yang diperoleh suatu daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, artinya kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan menentukan jalannya perkembangan dan pembangunan daerah tersebut (Nugraheni, dkk. 2019). Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki 29 kabupaten dan 6 kota. Sebagai salah provinsi yang ada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah telah mengatur sedemikian rupa dalam pemenuhan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengoptimalan pengelolaan finansial dalam suatu daerah dilakukan dengan menggunakan asas otonomi yang mendukung terselenggaranya pemerintahan. Setiap daerah berkewajiban mengelola keuangan termasuk dalam menggali potensi pendapatan daerahnya. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan lancarnya setiap kegiatan maupun urusan pemerintahan dalam suatu daerah maka setiap tahunnya ditentukan target PAD.

Fenomena yang terjadi di Jawa Tengah bahwa target PAD 2018 mencapai Rp 12,9 Triliun (*bisnis.com*, 2018). Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa pada tahun sebelumnya PAD Jateng selalu melampaui target seiring dengan tumbuhnya perekonomian, sedangkan tahun 2016 pada semester ke II target PAD diturunkan karena pada semester yang pertama kondisinya masih sangat jauh dalam pencapaian target. Dengan kondisi tersebut pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah harus bekerja dengan lebih sungguh. Hasil dari kerja keras tersebut di tahun 2017 pada semester I Provinsi Jawa Tengah sudah melampaui target (Portal berita Jateng, 2017).

PAD merupakan perwujudan dari penggalian sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah (Rizqy Ramadhan, 2019). Menurut laporan realisasi anggaran Provinsi Jawa Tengah yang didapat, bahwa hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah komponen-komponen yang menambah PAD. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (UU No 28 Tahun 2009). Pemerintah mengenakan retribusi atas beberapa peyalanan tertentu yang diberikan secara langsung. Pajak Daerah yakni pajak yang didapat dari setiap daerah. Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Menurut jenis pajaknya, pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) termasuk dalam jenis pajak daerah kabupaten/kota. Pajak-pajak tersebut adalah pajak yang sering muncul dalam data realisasi pajak daerah tahunan. Hal ini juga dapat mempengaruhi naik turun PAD dalam pencapaian target di setiap tahunnya.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi PAD telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqy Ramadhan (2019) dan Yusmalina dkk (2020) menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hafandi dan Romandhon (2020) juga penelitian oleh Nugraheni, dkk (2019) hasilnya sangat berbanding terbalik yaitu retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sihombing dan Tambunan (2020) pajak reklame berpengaruh signifikan positif terhadap PAD hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita dan Yanti (2018) bahwa Pajak Reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Pajak parkir berpengaruh positif signifikan terhadap PAD dinyatakan dalam penelitian Sihombing dan Tambunan (2020). Pajak restoran dalam penelitian Widodo

dan Guritno (2017) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD tetapi pada penelitian Fikri dan Mardani (2017) pajak restoran berpengaruh positif signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Yusran Siregar (2017) menyatakan bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) berpengaruh signifikan positif terhadap PAD berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Juniar (2020) bahwa BPHTB tidak berpengaruh signifikan positif terhadap PAD. Hasil beberapa penelitian yang berbeda tersebut, menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi PAD khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor (retribusi daerah, pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan terhadap perolehan PAD di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan evaluasi bagi pemerintah khususnya bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dalam kaitannya dengan peningkatan PAD.

## **KAJIAN TEORI**

Penelitian ini didasari dengan menggunakan Teori Stewardship. Teori ini mendasari pada sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok di atas kepentingan pribadi yang hanya melayani kepentingan pribadi seseorang (Jefri, 2018). Teori ini menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori tersebut mengungkapkan bahwa adanya hubungan atau keterkaitan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan suatu organisasi. Penerapan teori pada penelitian ini untuk sektor publik, terutama yang berhubungan dengan pemerintahan khususnya pemerintah daerah yang tidak mementingkan tujuan masing-masing daerah tetapi untuk mencapai tujuannya kesejahteraan masyarakat melalui tercapainya target PAD setiap tahunnya. Pencapaian tersebut juga untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat pada daerah tersebut.

PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut. PAD sebagai tulang punggung pembiayaan daerah, di mana kemampuan suatu daerah dalam menggali PAD akan menentukan jalannya perkembangan dan pembangunan daerah tersebut (Nugraheni, I. P., Rusmijati, & Indrawati, L. R. (2019). Salah satu komponen dalam PAD adalah retribusi daerah, yang bersumber dari Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan adalah pengertian dari Retibusi Daerah (Nugraheni, dkk. 2019). Retribusi Daerah juga sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (UU No 28 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 ayat 64). Menurut UU No. 28 Tahun 2009 yang menganut sistem closed list menetapkan 30 jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh provinsi/kabupaten/kota. Jumlah ini bertambah menjadi 32 jenis setelah diterbitkannya PP No. 97 Tahun 2012.

Selain retribusi, pajak daerah merupakan sumber PAD pada suatu daerah. Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber PAD adalah pajak reklame. Menurut UU RI Nomor 28 Tahun 2009 Bab I pasal 1 ayat 26 menyatakan bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame sendiri merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan

komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum (UU RI Nomor 28 Tahun 2000 Bab I Pasal 1 ayat 27).

Dalam UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Jenis pajak Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan termasuk bagian dari sumber PAD pada suatu daerah. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten/Kota Jawa Tengah yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pencapaian target setiap tahunnya, khususnya PAD yang diperoleh masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah.

### **Populasi dan Sampel**

Sampel dalam penelitian ini menggunakan *judgement sampling* dengan kriteria kabupaten/kota yang memiliki data paling lengkap dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Populasinya sebanyak 35 kabupaten/kota dengan data yang paling lengkap hanya ada di 19 daerah. Periode yang digunakan selama 4 Tahun yaitu dari tahun 2015-2018. Berdasarkan jumlah daerah dan periode waktu maka jumlah data yang diamati (observed) sebanyak 76 data.

### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis data kuantitatif dengan ukuran angka yang didapat dari situs web Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah. Data yang dipakai adalah Laporan Per Jenis Pajak Kabupaten/Kota tahun 2015-2018.

### **Teknik Analisis**

Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Data Panel yang diolah dengan software E-views 11. Metode ini diawali dengan pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik (meliputi: normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas), uji hipotesis (ketetapan model, uji t, uji koefisien-determinasi).

## **PEMBAHASAN**

Metode yang paling awal dilakukan untuk penelitian ini adalah memilih model regresi terbaik diantara tiga model (Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect). Pemilihan model ini dilakukan dengan tiga uji yakni Uji Chow, Uji

Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Model yang terpilih pada penelitian ini adalah model fixed effect yang selanjutnya dijadikan pedoman untuk uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali untuk menguji persamaan pertama (variabel independen) dan persamaan kedua (variabel independen dengan variabel kontrol).

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Uji Normalitas**

Uji Normalitas digunakan untuk menguji kenormalan distribusi data. Uji ini menggunakan jarque-bera dengan kriteria keputusan apabila nilai probabilitas jarque-bera  $< 0.05$  maka sebaran data terdistribusi normal. Hasil penelitian pada uji normalitas diperoleh nilai sebesar 0,09 yang berarti data pada penelitian ini terdistribusi normal.

#### **Uji Multikolinieritas**

Hasil uji multikolinieritas pada penelitian ini menyatakan terdapat masalah atau terdeteksi multikolinieritas. Adanya masalah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya data. Pada penelitian ini tidak sepenuhnya semua data yang didapat di setiap Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dimasukkan untuk diuji, karena data awal yang didapat juga tidak lengkap maka dari itu hasil uji multikolinieritas terdapat masalah.

#### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi dilakukan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi antara residual pada periode saat ini ( $t$ ) dipengaruhi oleh tahun sebelumnya ( $t-1$ ). Hasil uji dinilai menggunakan kriteria Durbin Watson berdasarkan hasil dari model *fixed effect*. Persamaan pertama didapat nilai 2,444369 dan nilai persamaan ke dua sebesar 2,811145. Kedua hasil ini pada tabel Durbin Watson membuahakan keterangan yakni tidak terdapat autokorelasi.

#### **Uji Heteroskedastisitas**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual dari model yang terbentuk memiliki variasi yang konstan atau tidak. Pengujian ini menggunakan Uji White. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode white menghasilkan nilai probabilitas chi square sebesar 0,2408 lebih2besar3dari nilai4signifikansi8yaitu 0,05 yang berarti tidak ada gejala heteroskedastisitas.

#### **Uji Hipotesis**

Hasil uji ketepatan model pada tabel 1 membuktikan apakah semua variabel independen secara bersamaan mempengaruhi variabel dependen atau tidak. Hasil uji F didapat dari tabel fixed effect dengan nilai probabilitas F-statistic sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model tersebut tepat untuk digunakan.

**Tabel 1 Hasil Uji Ketepatan Model**

Root MSE	5.59E+10	R-squared	0.657897
Mean dependent var	3.06E+11	Adjusted R-squared	0.622680
S.D. dependent var	9.61E+10	S.E. of regression	5.91E+10
Akaike info criterion	52.54068	Sum squared resid	2.37E+23
Schwarz criterion	52.78603	Log likelihood	-1988.546
Hannan-Quinn criter.	52.63873	F-statistic	18.68147
Durbin-Watson stat	1.629813	Prob(F-statistic)	0.000000

Selain itu, Uji Parsial dilakukan untuk menilai pengaruh setiap masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai dari t-statistic setiap variabel dapat dilihat dari tabel 2 berikut :

**Tabel 2 Hasil Uji Parsial**

Variable	t-Statistic	Prob.
C	2.230483	0.0302
RETRIBUSI_DAERAH	-3.274603	0.0019
PAJAK_REKLAME	-0.144216	0.8859
PAJAK_PARKIR	-1.616158	0.1124
PAJAK_RESTORAN	0.891422	0.3770
BEA_PEROLEHAN	4.891802	0.0000
JUMLAH_PENDUDUK	2.186643	0.0335
LUAS_WILAYAH_HEKTAR	-0.737105	0.4645

Sumber: Output E-views 11.

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah, bea perolehan dan jumlah penduduk yang memiliki pengaruh terhadap PAD, sedangkan variabel yang lain (pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran dan luas wilayah) tidak berpengaruh terhadap PAD.

Hasil analisis uji hipotesis pada uji parsial (uji t) pada tabel 2 menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah mempunyai nilai probabilitas sebesar  $0,0084 < 0,05$  dari nilai signifikansi. Persamaan kedua pada analisis uji parsial (t) variabel retribusi daerah menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0,0019 < 0,05$  dari nilai signifikansi. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis pertama yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap PAD benar atau H1 tidak diterima.

Teori stewardship yang mengatakan bahwa lebih mendahulukan tujuan akhirnya dari pada tujuan pribadinya berkaitan dengan penelitian ini. Pemerintah daerah (Pemda) bukan mementingkan apa yang menjadi hak mereka namun pemda memberikan pelayanan atau jasa terbaik untuk pungutan retribusi daerah. Kegiatan pungutan retribusi daerah yang rutin maka dapat memenuhi PAD. Hasil pengaruh retribusi daerah terhadap PAD pada penelitian ini yaitu berpengaruh signifikan negatif dengan penjelasan bahwa retribusi yang mempunyai arti sebagai pungutan atas pemberian jasa dari pemerintah ini akan terjadi penurunan apabila tarif retribusinya dinaikkan. Retribusi pasar menjadi salah satu pungutan yang masuk dalam jenis retribusi jasa umum. Pungutan yang dikenakan pada pedagang pasar dengan tarif yang semakin tinggi atau semakin mahal maka pedagang akan enggan untuk menggunakan pemberian fasilitas dari pemerintah (kios, los, dll), lebih memilih untuk tidak membayar dan berdagang di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Hasil penelitian ini tidak sejalan

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019) dan Yusmalina, dkk (2020) yang menyatakan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD.

Hasil analisis uji hipotesis pada uji parsial (uji t) pada tabel 2 juga menunjukkan bahwa variabel pajak reklame sebesar  $0,9530 > 0,05$  dari nilai signifikansi. Hasil pada persamaan yang kedua variabel pajak reklame sebesar  $0,8859 > 0,05$  dari nilai signifikansi. Hal ini berarti kedua persamaan tersebut menolak H<sub>2</sub>, variabel pajak reklame tidak berpengaruh signifikan positif terhadap variabel terikat (PAD). Hipotesis ke dua ditolak karena masih banyaknya oknum-oknum yang melanggar hukum dengan tidak membayar pajak reklame. Hal lain yang dapat mendukung hasil penelitian ini yaitu banyak reklame yang tidak berizin yang juga menjadi salah satu alasan mengapa nominal dari pajak reklame tidak sebesar pajak-pajak yang lainnya. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Halomoan dan Bonifasius (2020) bahwa Pajak Reklame mempunyai pengaruh yang tidak signifikan.

Hasil analisis uji hipotesis tabel 2 menunjukkan bahwa variabel pajak parkir mempunyai nilai probabilitas sebesar  $0,1889 > 0,05$  dari nilai signifikansi. Persamaan kedua menunjukkan hasil yang berbeda yakni pajak parkir mempunyai nilai probabilitas sebesar  $0,1124 > 0,05$  dari nilai signifikansi. Hal ini berarti H<sub>3</sub> ditolak, variabel pajak parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (PAD). Pajak parkir yang tidak begitu dikumandangkan pada kalayak umum membuat keberadaan pajak parkir tidak sepenuhnya diketahui oleh semua orang. Masih banyak daerah/wilayah di kabupaten/kota yang belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga kontribusi pajak parkir terhadap PAD kurang maksimal. Hasil penelitian ini diperkuat oleh penelitian Fajarty, dkk (2020) yang menyatakan bahwa pajak parkir tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD.

Hasil analisis uji hipotesis pada tabel 2 menunjukkan bahwa variabel pajak restoran sebesar  $0,5620 > 0,05$  dari nilai signifikansi. Hasil pada persamaan kedua mempunyai nilai probabilitas sebesar  $0,3770 > 0,05$  dari nilai signifikansi. Hal ini berarti H<sub>4</sub> ditolak, variabel pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (PAD). Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian Sylvianur dan Fahraty (2020) yang menyatakan bahwa pajak restoran kurang memberikan kontribusi terhadap PAD. Pada tabel 1 tersebut juga menunjukkan bahwa variabel BPHTB sebesar  $0,0000 < 0,05$  dari nilai signifikansi. Hasil pada persamaan kedua mempunyai nilai probabilitas yang sama dengan persamaan pertama yakni sebesar  $0,0000 < 0,05$  dari nilai signifikansi. Hal ini berarti variabel BPHTB berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (PAD). Data yang diperoleh pada pajak daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah periode 2015-2018 menampilkan jumlah nominal BPHTB dengan nominal yang paling besar dibandingkan pajak daerah lainnya. Nominal yang besar didapatkan dari pungutan pemerintah atas jasa pelayanan yang diberikan. Hal tersebut mendukung hasil pengujian ini bahwa besarnya nominal BPHTB menambah besarnya pengaruh terhadap PAD. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh Yusran dan Siregar (2017) bahwa BPHTB berpengaruh signifikan positif terhadap PAD.

Hasil analisis pada tabel 2 juga menunjukkan peran variabel kontrol terhadap variabel PAD. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel kontrol jumlah penduduk memiliki nilai signifikansi sebesar  $0,0335 < 0,05$ . Hal ini berarti variabel jumlah penduduk dapat mengontrol variabel dependen (PAD). Jumlah penduduk yang banyak akan semakin menambah banyaknya PAD yang diperoleh suatu daerah. Orang akan melakukan dan melaksanakan kewajiban perekonomiannya dengan

baik di tempat dimana ia tinggal. Dengan begitu banyaknya jumlah penduduk dapat mengontrol PAD. Selain variabel kontrol jumlah penduduk, variabel kontrol lain dalam penelitian ini adalah variabel luas wilayah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai probabilitas variabel kontrol luas wilayah sebesar  $0,4645 > 0,05$  dari nilai signifikansi. Hal ini berarti variabel luas wilayah tidak dapat mengontrol variabel dependen (PAD). Luas wilayah yang tidak dapat mengontrol PAD ini bertentangan dengan hasil BPHTB yang berpengaruh positif terhadap PAD. Hal tersebut dikarenakan bahwa tarif BPHTB di setiap daerahnya memakai nominal yang berbeda-beda. Tarif tersebut tidak hanya dihitung berdasarkan luas wilayahnya namun termasuk juga bangunan di atasnya. Bea perolehan juga didapat dari pemasukan dalam perseroan maupun badan hukum lain, hibah, waris dan pertukaran.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor-faktor tersebut diantaranya retribusi daerah, pajak reklame, pajak parkir, pajak restoran, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau variabel independen pada penelitian ini. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel retribusi daerah dan variabel Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD yang diperoleh dalam suatu daerah, sedangkan untuk variabel pajak reklame, pajak restoran, pajak parkir tidak berpengaruh terhadap PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (BPS). (N.D.). Badan Pusat St. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Bawono, A. Dan, Fendha, A., & Shina, I. (2018). *Ekonometrika Terapan untuk Ekonomi dan Bisnis Islam*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga.
- Bisnis.Com. (2018). *Jateng Targetkan PAD 2018 Capai Rp 12,9 Triliun*. <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20180220/78/740795/jateng-targetkan-pada-2018-capai-rp129-triliun>
- Direktorat Jendral Pengelola Keuangan (DJP). (N.D.). [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)
- Fajarty, M., Fatahurrzak, & Husna, A. (2020). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018. 1(2), 228–239.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012 - 2016). *Jurnal Riset Manajemen*, 6(1), 84–98.
- Ghodang, H., & Hantono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Konsep Dasar & Aplikasi Analisis Regresi dan Jalur Dengan SPSS (F. Ghodang (Ed.))*. PT. Penerbit Mitra Group.



- Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh Pajak Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal Of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 182–191. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337>
- Haryanti, S. S., Tatok, F. F. S., & Edy, I. C. (2020). The Effect of Efficiency Ratio, Effectiveness Ratio, Contribution Ratio Of Land and Building Tax on Local Own Source Revenue in Sukoharjo Regency 2016-2018 (Empirical Study of The Regional Finance Agency in Sukoharjo Regency). 4(2), 11–22.
- Iqbal, M., & Juniar, S. (2020). Pengaruh Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung. 4(2), 53–71.
- Jateng, P. B. P. (2017). Pertengahan 2017, PAD Jateng Lampau Target. Portal Berita. <https://jatengprov.go.id/publikpertengahan-2017-pad-jateng-lampau-target/>
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset Edisi Xxvi*, 4(3), 14–28.
- Kompas. (2016). Realisasi Kurang Pemprov Jateng Turunkan Target Pendapatan Asli Daerah. [https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2016/08/15/14043071/realisasi\\_kurang.pemprov.jateng.turunkan.target.pendapatan.asli.daerah](https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2016/08/15/14043071/realisasi_kurang.pemprov.jateng.turunkan.target.pendapatan.asli.daerah)
- Nugraheni, I. P., Rusmijati, & Indrawati, L. R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2018. *Directory Journal of Economic*, 1(3), 338–347.
- Pratama, R., Sudarmanto, E., & Timuriana, T. (2017). Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5.
- Republik Indonesia, (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. In *Society* (Vol. 3).
- Rizqy Ramadhan, P. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 81. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.2455>
- Sakti, I. (2018). Analisis Regresi Data Panel Menggunakan Eviews. In *Modul Eviews 9*.
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2019). Analysis of Effectiveness and Contribution of Tax on The Rights Of The Land And Building ( BPHTB ) on Regional Original Revenue ( PAD ) in Pariaman City Before and After Become a Local Tax ( 2009-2015 ). 4(10), 950–960.
- Sihombing, H., & Tambunan, B. H. (2020). Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Economics and Business*, 1(2), 65–75.

- Sylvianur, R., & Fahraty, E. (2020). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banjarmasin. 3(1), 144– 157.
- Widarjono, A. (2005). *Ekonometrika : Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*.
- Widodo, W. I., & Guritno, B. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Yogyakarta. *Jurnal Visi Manajemen*, 2(2), 128–138.
- Wirnarno, W. W. (2009). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*.
- Yusmalina, Lasita, & Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode Tahun 2016-2018. *Jurnal Cafeteria*, 1(1), 13–21.
- Yusran, R. R., & Siregar, D. L. (2017). Pengaruh BPHTB dan PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Aksara Public*, 1(3), 73–84.